



KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RAKORNAS KELITBANGAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2019
BIDAKARA HOTEL JAKARTA, 21 NOPEMBER 2019



Drs. Matheos Tan, MM
KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH



5 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

01

Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: Kawasan Industri Kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pariwisata, Kawasan Persawahan, Kawasan Perkebunan dan tambak-tambak perikanan



02

Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi, dan infrastruktur dasar untuk kesehatan dan produktivitas



03

Mendorong Investasi

Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya



04

Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga



05

Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, emningkatkan kesejahteraan masyarakat.



TUGAS NEGARA MELAYANI RAKYAT

Pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI Periode 2019-2024

“Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.”

Presiden Joko Widodo
Minggu, 20 Oktober 2019



#Bersama

NILAI & CARA BARU INDONESIA MAJU

Pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI Periode 2019-2024

“Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton.”

Presiden Joko Widodo
Minggu, 20 Oktober 2019



#BersamaIndonesiaMaju

INOVASI INDONESIA MAJU

Pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI Periode 2019-2024

“Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.”

Presiden Joko Widodo
Minggu, 20 Oktober 2019



#BersamaIndonesiaMaju



REGULASI INOVASI DAERAH

#1



UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH



PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386)

Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7)

Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9)

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389)

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1)

Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (Pasal 22)

Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23)

Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1)

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Pasal 1)



TUJUAN INOVASI DAERAH

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui:

- Peningkatan Pelayanan Publik;
- Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- Peningkatan daya saing Daerah

BENTUK INOVASI DAERAH

- Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- Inovasi Pelayanan Publik
- Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

KRITERIA INOVASI DAERAH

- Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
- Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
- Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- Dapat direplikasi

UNSUR PEMBINA INOVASI DAERAH

TINGKAT PUSAT



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH KEMENDAGRI

PEMERINTAHAN DAERAH



BADAN/UNIT YANG MEMBIDANGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

DAPAT BERASAL DARI:

1. Kepala Daerah;
2. Anggota DPRD;
3. ASN;
4. Perangkat Daerah; dan
5. Anggota masyarakat

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 22 s.d 27

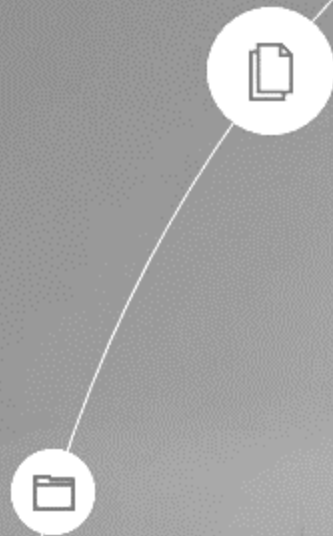
- ◆ Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.
- ◆ Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah digunakan menteri untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pemerintah Daerah.

PENERAPAN HASIL INOVASI DAERAH Pasal 20

- ◆ **Perda**, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/ atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- ◆ **Perkada**, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.



Data is the
new electricity



INDEKS INOVASI DAERAH



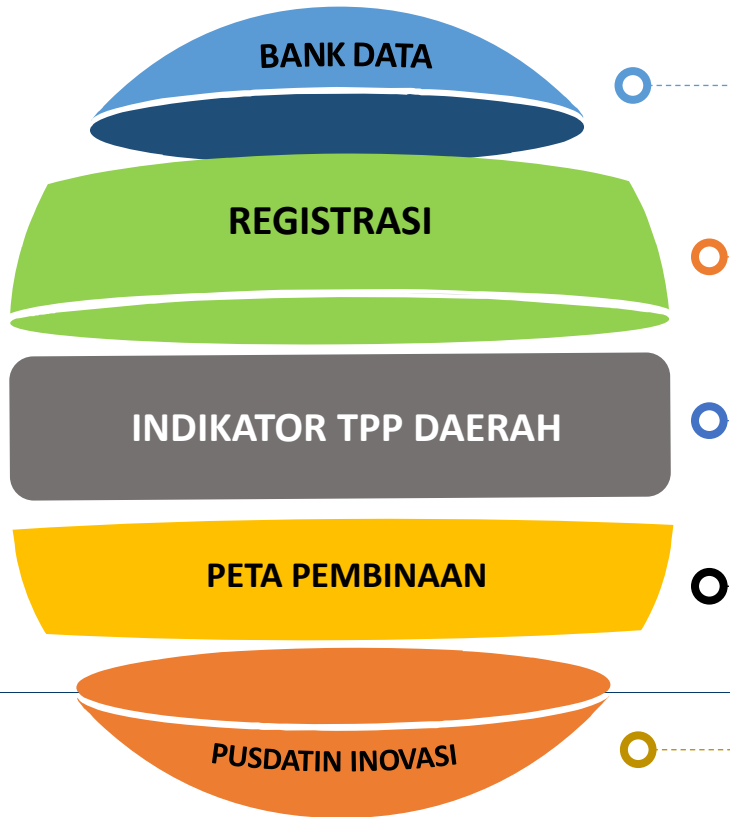
#2



DIATUR LEBIH RINCI DI DALAM PERMENDAGRI NO. 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH

INDEKS INOVASI DAERAH ADALAH HIMPUNAN Inovasi Daerah yang telah **DILAPORKAN** kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

APA FUNGSI INDEKS INOVASI DAERAH ?



HIMPUNAN INOVASI DAERAH yang diinput oleh pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam suatu aplikasi (Indeks Inovasi Daerah) yang dijadikan pusat data Inovasi Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pengkajian dan pengembangan Inovasi daerah

WADAH PELAPORAN INOVASI DAERAH sebagaimana amanat peraturan perundangan agar setiap Inovasi Daerah dilaporkan kepada Menteri baik terkait uji coba maupun penerapan Inovasi Daerah.

KOMPONEN VARIABEL PENGUNGKIT INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH sebagaimana amanat Kepmendagri No. 061 – 5449 Tahun 2019 variabel pendukungnya sebesar 3% berdasarkan Indeks Inovasi Daerah Tahun berkenan.

INSTRUMEN PENGUKURAN INOVASI DAERAH untuk mengetahui perkembangan inovasi di Daerah sehingga dapat menghasilkan Peta pembinaan sesuai karakteristik dan permasalahan di Daerah.

SARANA INFORMASI DAN PEMBELAJARAN untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang Inovasi bagi pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi.



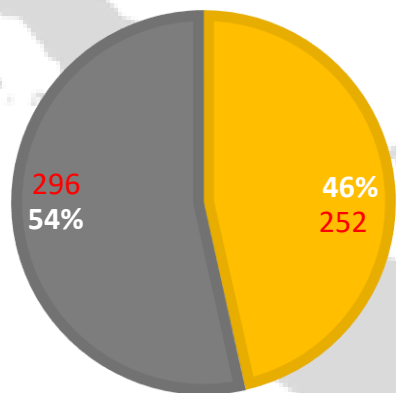
KONDISI INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2019

TOTAL 252 PEMERINTAH DAERAH YANG MENGINPUT INOVASI

(DARI 542 PEMERINTAH PROVINSI, KAB/KOTA DI INDONESIA) DKI JAKARTA DI HITUNG 1 PROVINSI, TIDAK DIJABARKAN WILAYAH ADMINISTRATIFNYA

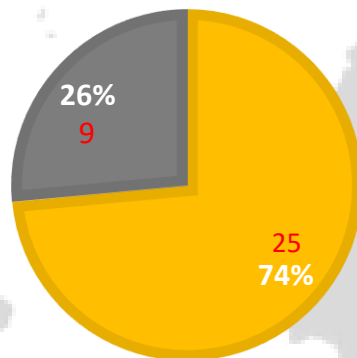
TOTAL

■ INPUT DATA ■ BELUM INPUT



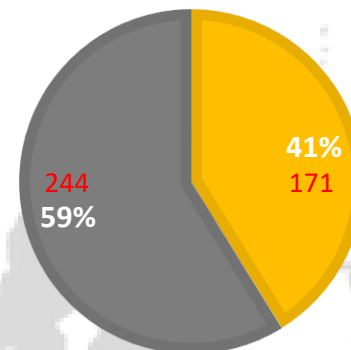
PROVINSI

■ INPUT DATA ■ BELUM INPUT



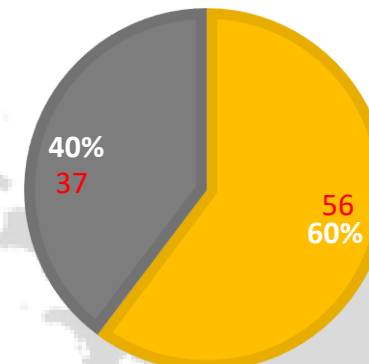
KABUPATEN

■ INPUT DATA ■ BELUM INPUT

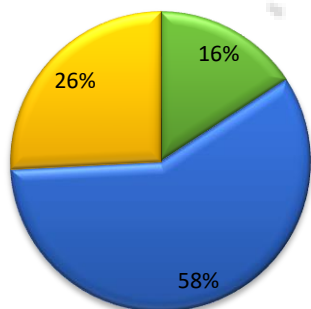


KOTA

■ INPUT DATA ■ BELUM INPUT

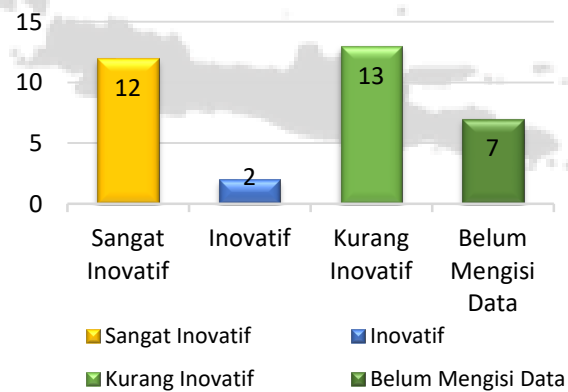


Total = 8.016 Inovasi

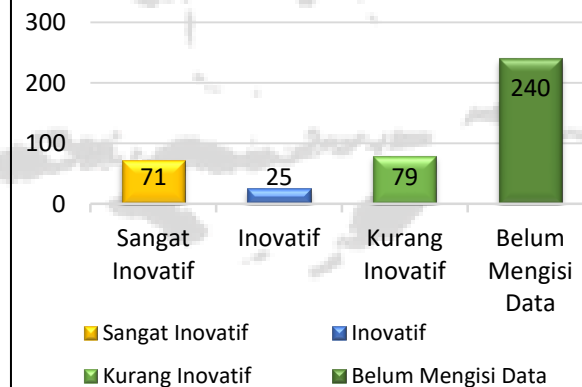


- Tata Kelola Pemerintahan
- Pelayanan Publik
- Inovasi Bentuk Lainnya

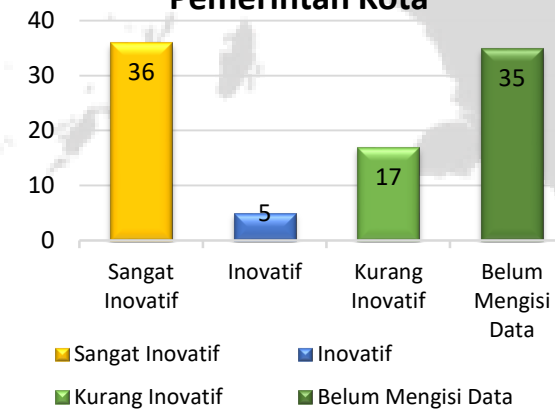
Pemerintah Provinsi



Pemerintah Kabupaten



Pemerintah Kota





BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD 2019



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD 2019



INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD



#3



PP NO. 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH

PASAL 22

1. MENTERI **MELAKUKAN PENILAIAN** TERHADAP DAERAH YANG MELAKSANAKAN INOVASI DAERAH BERDASARKAN LAPORAN DARI KEPALA DAERAH
2. PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN HASIL INOVASI DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) UNTUK **MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

PASAL 25

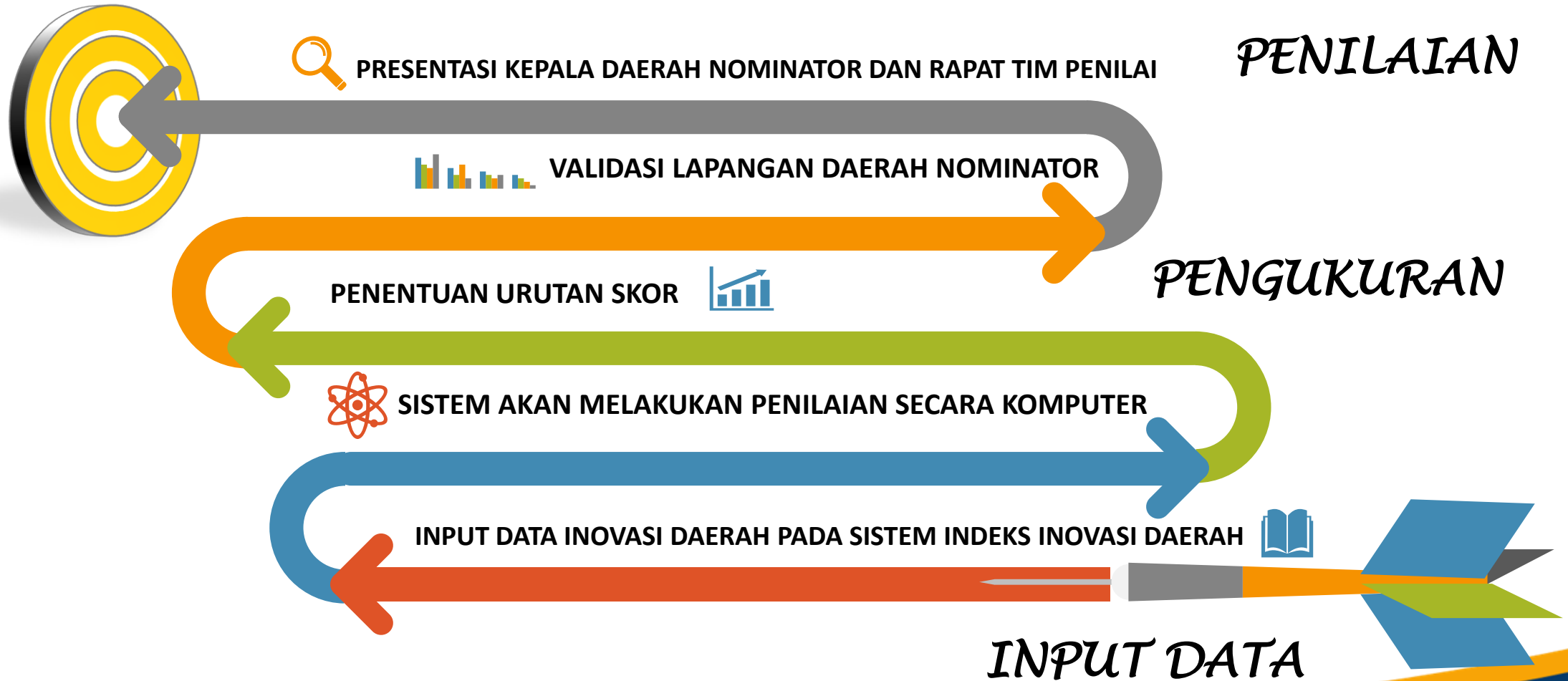
- (1) **MENTERI MENETAPKAN** PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI **CALON PENERIMA PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH** BERDASARKAN HASIL PENILAIAN INOVASI DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 DAN 24
- (2) BERDASARKAN PENETAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), **MENTERI MENENTUKAN PENERIMA PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF** KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA YANG BERHASIL DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH
-
- (5) KETENTUAN LEBIH LANJUT **MENGENAI PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH** DIATUR DENGAN **PERATURAN MENTERI**.

PERSYARATAN

- KEGIATAN INOVASI DAERAH YANG DIUSULKAN MEMILIKI KEBAHARUAN DAN KEUNIKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN.
- KEGIATAN INOVASI DAERAH YANG DIUSULKAN MINIMAL TELAH BERJALAN 2 TAHUN, BUKAN MERUPAKAN KEGIATAN YANG SEDANG DIRENCANAKAN ATAU SEDANG DIKERJAKAN.
- KEGIATAN INOVASI DAERAH YANG DIUSULKAN ADALAH KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN DANA APBD DAN/ATAU DARI SUMBER PEMBIAYAAN LAIN YANG SAH.
- KEGIATAN INOVASI DAERAH YANG DIUSULKAN TELAH MEMBERIKAN DAMPAK/MANFAAT BAGI DAERAH DAN MASYARAKAT SERTA BERSIFAT KEBERLANJUTAN.
- PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENGIRIMKAN SELURUH PROFIL INOVASI DAERAH YANG TELAH BERHASIL DILAKUKAN PADA SELURUH BENTUK/BIDANG INOVASI DAERAH MELALUI [HTTP://INDEKS.INOVASI.OTDA.GO.ID/LAYANAN/](http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan/) SESUAI DENGAN TANGGAL PENGUMPULAN DAN SEBELUM KEGIATAN PENILAIAN DILAKUKAN.



PENETAPAN PEMENANG IGA





(INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)) TAHUN 2019

SK MENDAGRI NO. 002.6 – 5315 TAHUN 2019

PUSLITBANG INDAH



PROVINSI TERINOVATIF :

1. JAWA TENGAH
2. JAWA BARAT
3. SUMATERA BARAT
4. DKI JAKARTA
5. RIAU

KABUPATEN TERINOVATIF :

1. BANYUWANGI
2. KULON PROGO
3. MALANG
4. SITUBONDO
5. BANGGAI
6. AGAM
7. MUSI RAWAS
8. HULU SUNGAI SELATAN
9. BOGOR
10. PADANG PARIAMAN

KOTA TERINOVATIF :

1. DENPASAR
2. BOGOR
3. BONTANG
4. MALANG
5. CIMAHI
6. BANDUNG
7. MAKASSAR
8. MAGELANG
9. SURAKARTA
10. SURABAYA

KAB/KOTA TERTINGGAL TERINOVATIF :

1. SIGI
2. NABIRE
3. BELU

KAB/KOTA PERBATASAN TERINOVATIF :

1. PELELAWAN
2. BENGKALIS
3. MOROTAI



AKAN MENDAPAT DANA INSENTIF INOVASI DAERAH PADA TAHUN 2021

APABILA MEMENUHI KETENTUAN/KRITERIA YANG AKAN DIATUR SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU





(INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA))



ALOKASI DANA INSENTIF INOVASI DAERAH 2020

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		PEROLEHAN DID (dalam ribuan rupiah)
		NOMOR	SKOR	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAWA BARAT	1	24740	-
2.	JAWA TIMUR	2	14411	7.526.031
3.	SUMATERA BARAT	3	14300	7.468.062
4.	DKI JAKARTA	4	12209	6.376.054
5.	BALI	5	12015	6.274.739

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		PEROLEHAN DID (dalam ribuan rupiah)
		NOMOR	SKOR	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANYUWANGI	1	17278	9.023.299
2.	PADANG PARIAMAN	2	15457	-
3.	BANGGAI	3	11821	-
4.	GRESIK	4	9716	5.074.104
5.	KULON PROGO	5	9456	4.938.321
6.	KLUNGKUNG	6	7323	3.824.379
7.	SIDOARJO	7	7084	3.699.563
8.	AGAM	8	6816	3.559.602
9.	PACITAN	9	6572	3.432.175
10.	MUSI RAWAS	10	4388	2.291.598

SURAT MENTERI KEUANGAN NO. S-702/MK.07/2019

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		PEROLEHAN DID (dalam ribuan rupiah)
		NOMOR	SKOR	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANDUNG	1	15857	8.281.193
2.	MAKASSAR	2	13071	6.798.025
3.	BONTANG	3	9613	5.020.313
4.	MALANG	4	9134	4.770.159
5.	SURABAYA	5	8957	4.677.722
6.	MAGELANG	6	8921	4.658.922
7.	SOLOK	7	8779	4.584.763
8.	BOGOR	8	8771	4.580.585
9.	MATARAM	9	6890	3.598.248
10.	SURAKARTA	10	6093	3.182.021

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		PEROLEHAN DID (dalam ribuan rupiah)
		NOMOR	SKOR	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUSI RAWAS	1	4388	DIHITUNG SATU
2.	SITUBONDO	2	4271	2.230.496
3.	PULAU MOROTAI	3	4212	2.199.684

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT		PEROLEHAN DID (dalam ribuan rupiah)
		NOMOR	SKOR	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PULAU MOROTAI	1	4212	DIHITUNG SATU
2.	PELELAWAN	2	3968	2.072.257
3.	BELU	3	2456	1.282.627



**SK MENTERI DALAM NEGERI NO. 002.6 – 115 Tahun 2019
PENYUSUNAN HASIL PENGUKURAN INDEKS INOVASI DAERAH
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 002.6- 115 Tahun 2019

TENTANG

PENYUSUNAN HASIL PENGUKURAN INDEKS INOVASI DAERAH
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

SURAT MENTERI DALAM NEGERI NO. 900/12935/SJ

**PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH KATEGORI INOVASI
PEMERINTAH DAERAH TA. 2020**



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 20 November 2019

Nomor : 900/12935/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas.
Perihal : Penggunaan Dana Insentif Daerah
Kategori Inovasi Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2020.

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
(sebagaimana terlampir)
di Tempat

Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor: S-702/MK-07/2019 tanggal 24 September 2019 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam surat Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan Dana Insentif Daerah, termasuk Dana Insentif Daerah Kategori Inovasi Pemerintah Daerah (DID-KIPD) Tahun Anggaran 2020. Pemberian DID-KIPD tersebut merupakan bentuk insentif dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah yang inovatif.

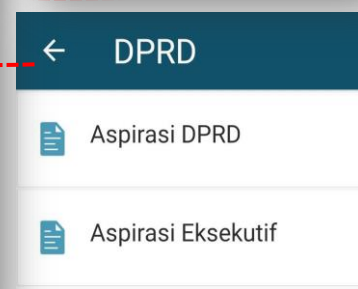
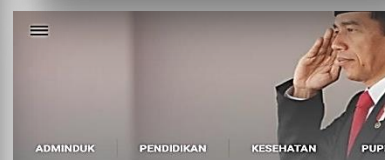
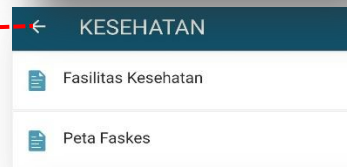
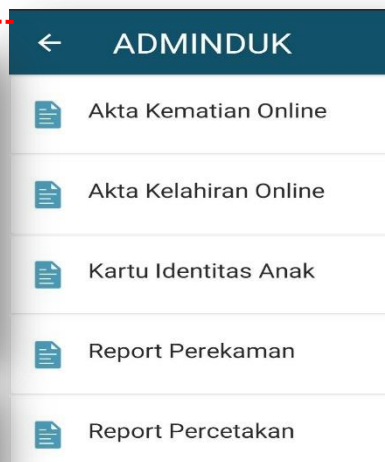
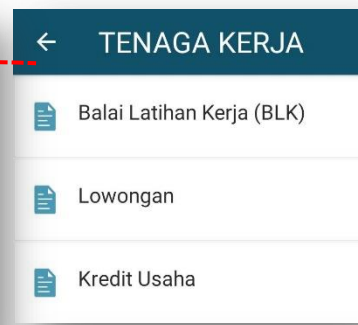
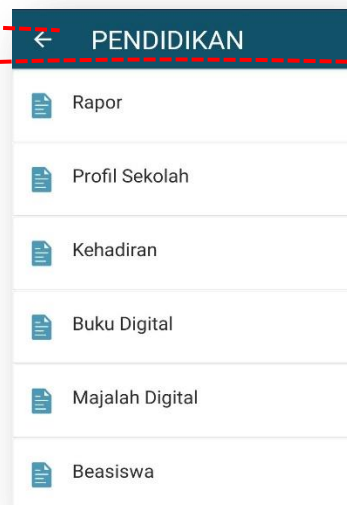
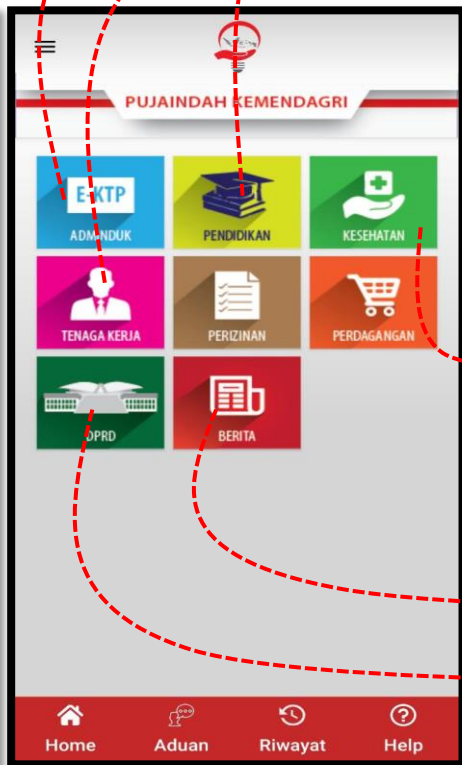


PUJA INDAH

#4



PUSAT JEJARING INOVASI DAERAH (PUJA INDAH)



(PUSAT JEJARING INOVASI DAERAH) ADALAH KUMPULAN BERBAGAI APLIKASI LAYANAN PEMERINTAHAN. SAAT INI TELAH ADA 7 APLIKASI LAYANAN YANG DIMUAT DI DALAM PUJA INDAH, YAITU: PERIZINAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN, KOMODITAS, KETENAGAKERJAAN, UPDATE KEPENDUDUKAN DAN ASPIRASI DPRD/EKSEKUTIF



PENDIDIKAN



Layanan Pendidikan dikembangkan untuk mendorong keterlibatan orang tua, masyarakat dan sekolah di dalam proses penyelenggaraan pendidikan di daerah melalui **penyediaan informasi tentang administrasi sekolah dan rapor online**, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat secara mudah memantau perkembangan anak didik dalam mengikuti proses pendidikannya serta memantau kapasitas sekolah dalam proses belajar mengajar.

KESEHATAN



Layanan Kesehatan dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pelaksanaan operasional layanan kesehatan di pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat. Aplikasi layanan kesehatan ini **meliputi pendaftaran puskesmas, administrasi puskesmas dan operasional puskesmas untuk mengetahui data dan informasi seputar data pasien, tenaga kesehatan, farmasi, ketersediaan ruangan, ketersediaan poli-poli rawat jalan, dan pendaftaran pasien**. Inovasi ini sekaligus untuk mendorong perbaikan tata kelola layanan kesehatan secara nasional yang dimulai dengan pembenahan pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat yaitu puskesmas.

KETENAGAKERJAAN



Layanan Ketenagakerjaan dikembangkan untuk memudahkan tenaga kerja memasuki lapangan pekerjaan melalui penyediaan informasi pelatihan kerja, sertifikasi keahlian, dan penyerapan oleh pasar kerja. Aplikasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan perluasan kesempatan kerja di daerah. Menu aplikasi ini **meliputi informasi Balai Latihan Kerja, kategori dan keahlian pelatih Balai Latihan Kerja, administrasi Balai Latihan Kerja, serta pendayaan alumni Balai Latihan Kerja yang memudahkan pasar kerja dalam memanfaatkan tenaga kerja**.

PERIZINAN



Layanan Perijinan bertujuan untuk mempercepat proses layanan oleh pemerintah daerah baik **berupa layanan perijinan dan non-perijinan** melalui penyediaan aplikasi sehingga masyarakat dapat mengurus perijinan secara *online* dan diproses secara *online* oleh perangkat daerah. Sistem ini akan terintegrasi dengan *Indonesia One* yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.

KOMODITI



Layanan Komoditi dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui **informasi harga komoditi di pasaran dan sekaligus membangun database komoditi** masyarakat sehingga masyarakat dapat mengunggah data berbagai komoditi yang mereka miliki, dengan demikian akan terbangun akumulasi secara nasional tentang komoditi tersebut.

DUKCAPIL



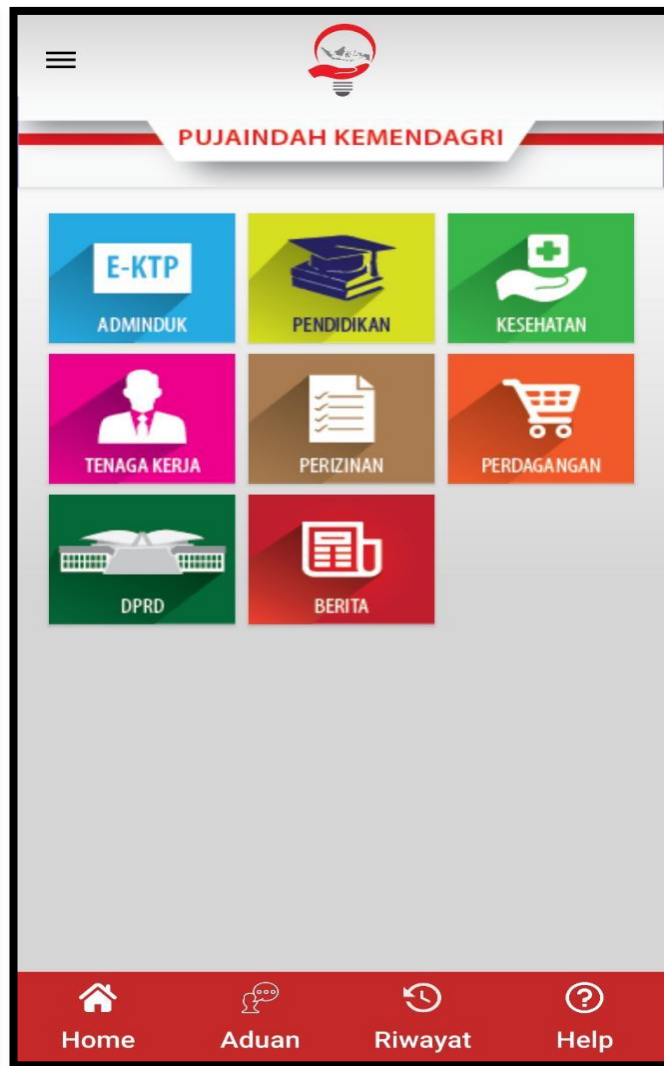
Layanan Dukcapil bertujuan agar dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dikelola secara nasional oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi-aplikasi layanan ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASPIRASI



Penyampaian aspirasi masyarakat langsung kepada anggota DPRD dan Eksekutif





APLIKASI YANG AKAN DI TERAPKAN KEPADA DAERAH YANG MENYATAKAN KOMITMEN SEBAGAI DAERAH PILOT

EKSISTING SAAT INI :

1. APLIKASI LAYANAN PERIZINAN
2. APLIKASI LAYANAN PENDIDIKAN
3. APLIKASI LAYANAN KESEHATAN
4. APLIKASI LAYANAN TENAGA KERJA
5. APLIKASI LAYANAN ADMINDUK
6. APLIKASI LAYANAN PERDAGANGAN
7. APLIKASI LAYANAN DPRD

ON PROGRESS

TAHUN 2020 :

1. APLIKASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (PENANGGULANGAN BENCANA)
2. BIDANG SOSIAL (DATA BASE KEMISKINAN)
3. BIDANG PARIWISATA
4. BIDANG PERIZINAN UMUM
5. BIDANG PERHUBUNGAN
6. BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (MUSRENBANG DESKAB, SIKERJA DAN PBB)

TAHUN 2020 AKAN ADA 13 LAYANAN



BEBERAPA DAERAH YANG TELAH MENGAJUKAN KESEDIAAN UNTUK MENJADI DAERAH PILOT

TAHUN 2018

- Provinsi : 8
 - Kota : 11
 - Kabupaten : 31
- } 50

TAHUN 2019

- Provinsi : 2
 - Kota : 11
 - Kabupaten : 30
- } 43



BEBERAPA HAL YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH BAIK PUSAT DAN DAERAH



PEMERINTAH DAERAH YANG INGIN MEREPLIKASI SESUATU INOVASI, SAMPAIKAN SURAT KEPADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Cq. PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH, SELANJUTNYA KITA FASILITASI MELALUI COPY SIANIDA



PEMERINTAH DAERAH PERLU MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK MENDORONG TERLAKSANANYA BIMBINGAN TEKNIS PUJA INDAH, FASILITATOR INOVASI DAERAH DAN KEGIATAN-KEGIATAN INOVASI LAINNYA GUNA MENDORONG PENERAPAN INOVASI DAERAH



PEMERINTAH DAERAH PERLU MELAKUKAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI ANTAR OPD UNTUK MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PENERAPAN INOVASI YANG ADA DAN DITERAPKAN PADA PEMERINTAH DAERAH



PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH

#5





01

SUMATERA DAN JAWA

11 Provinsi (32,4%) di wilayah Sumatera dan Jawa Telah memiliki skor dengan kategori Sangat Inovatif, dengan total inovasi yang terkumpul adalah 1148 inovasi/dengan kata lain 14,3% inovasi ada pada pemerintah provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa. Terdapat 2 provinsi yang belum menginput data inovasi yaitu Provinsi Aceh dan Lampung



Permasalahan/kendala di wilayah tengah dan timur Indonesia :

1. Sosialisasi yang masih kurang
2. Terkendala SDM, infrastruktur dan komunikasi dengan pemerintah pusat

03

SULAWESI

Hanya 2 provinsi yang telah menginput data inovasi yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan dengan jumlah inovasi sebanyak 39 (0,5%). Perlu sosialisasi yang lebih banyak untuk dapat meningkatkan partisipasi wilayah sulawesi



02

KALIMANTAN

Seluruh Provinsi di wilayah Kalimantan masih di kategorikan kurang inovatif. Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan tidak mengupload data inovasi tetapi mendapatkan skor karena mengisi indikator satuan pmdanya. Terdapat 51 (0,9%) total inovasi yang dilaporkan dari 5 provinsi yang ada



05

MALUKU DAN PAPUA

Pemerintah Provinsi di Maluku dan Papua telah melakukan pengisian data, namun belum optimal karena skornya masih di kategori kurang inovatif. Perlu sosialisasi dan pendampingan dalam penginputan data ke sistem dan pembinaan yang lebih aktif terhadap pengembangan inovasi di wilayah timur Indonesia ini



04

BALI DAN NUSTRA

Bali menjadi satu satunya pemerintah provinsi yang memiliki nilai sangat inovatif di wilayah tengah dan timur Indonesia. Nusa Tenggara Barat dan Timur belum melakukan pengisian data.

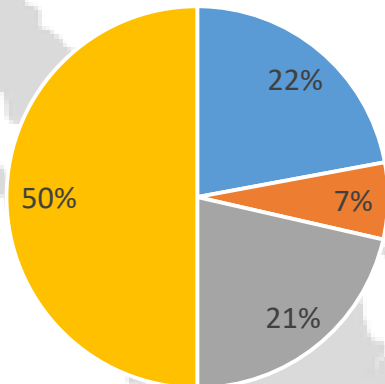




PETA PEMBINAAN INDEKS INOVASI DAERAH

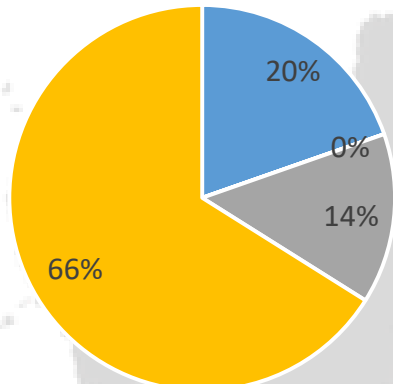
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SUMATERA (154 Kab/Kota)



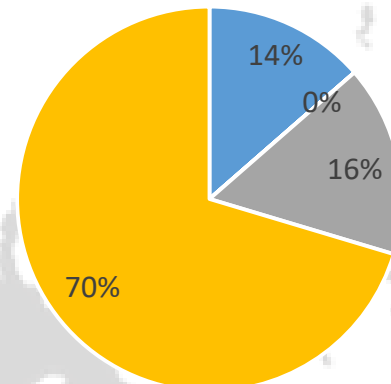
■ SANGAT INOVATIF ■ INOVATIF
■ KURANG INOVATIF ■ BELUM MENGISI DATA

KALIMANTAN (56 Kab/Kota)



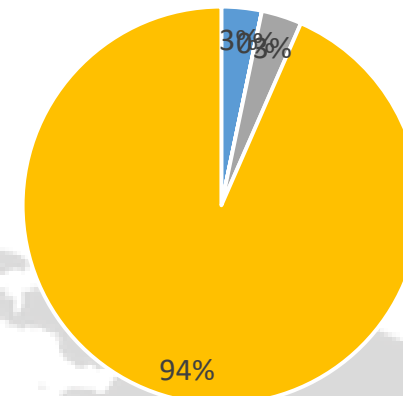
■ SANGAT INOVATIF ■ INOVATIF
■ KURANG INOVATIF ■ BELUM MENGISI DATA

SULAWESI (56 Kab/Kota)



■ SANGAT INOVATIF ■ INOVATIF
■ KURANG INOVATIF ■ BELUM MENGISI DATA

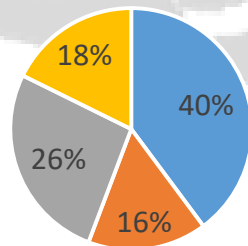
MALUKU DAN PAPUA (63 Kab/Kota)



■ SANGAT INOVATIF ■ INOVATIF
■ KURANG INOVATIF ■ BELUM MENGISI DATA

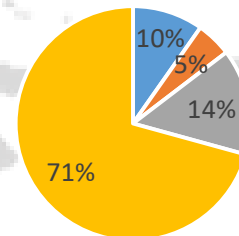
1. SEBAGIAN BESAR WILAYAH JAWA DAN SUMATERA TELAH MENGINPUT DAN MEMILIKI NILAI YANG CUKUP BAIK PERLU PENGUATAN SDM, DAN KOMITMEN DALAM PENGUATAN INOVASI
2. PERLU PENGUATAN SDM, DAN KOMITMEN DALAM PENGUATAN INOVASI

JAWA (113 Kab/Kota)



■ SANGAT INOVATIF ■ INOVATIF
■ KURANG INOVATIF ■ BELUM MENGISI DATA

BALI DAN NUSTRA (41 Kab/Kota)



■ SANGAT INOVATIF ■ INOVATIF
■ KURANG INOVATIF ■ BELUM MENGISI DATA

1. SEBAGIAN BESAR WILAYAH MALUKU, PAPUA DAN PAPUA BARAT BELUM MELAKUKAN PENGINPUTAN
2. PERLU SOSIALISASI DAN BIMBINGAN PENGINPUTAN



BEBERAPA HAL YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH BAIK PUSAT DAN DAERAH



PEMERINTAH DAERAH PERLU MENDORONG IDE-IDE KREATIF PADA PEMERINTAHAN SEPERTI MENDORONG MUNCULNYA INOVASI-INOVASI PADA OPD YANG DIKENAL DENGAN *"ONE INOVATION ONE AGENCY"*



PERLU DILAKUKAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBINA INOVASI DAERAH PENGINPUTAN DATA INOVASI DAERAH KE DALAM APLIKASI INDEKS INOVASI DAERAH



PERLU DIPERHATIKAN KELENGKAPAN DATA DUKUNG, BERUPA: PERDA/PERKADA, VIDEO INOVASI, MANFAAT INOVASI, SURVEI KEPUASAN, LAYANAN PENGADUAN DAN SEBAGAINYA



UNTUK WILAYAH TENGAH DAN TIMUR, KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI AGAR LEBIH AKTIF MELAKUKAN SOSIALISASI INDEKS INOVASI DAERAH

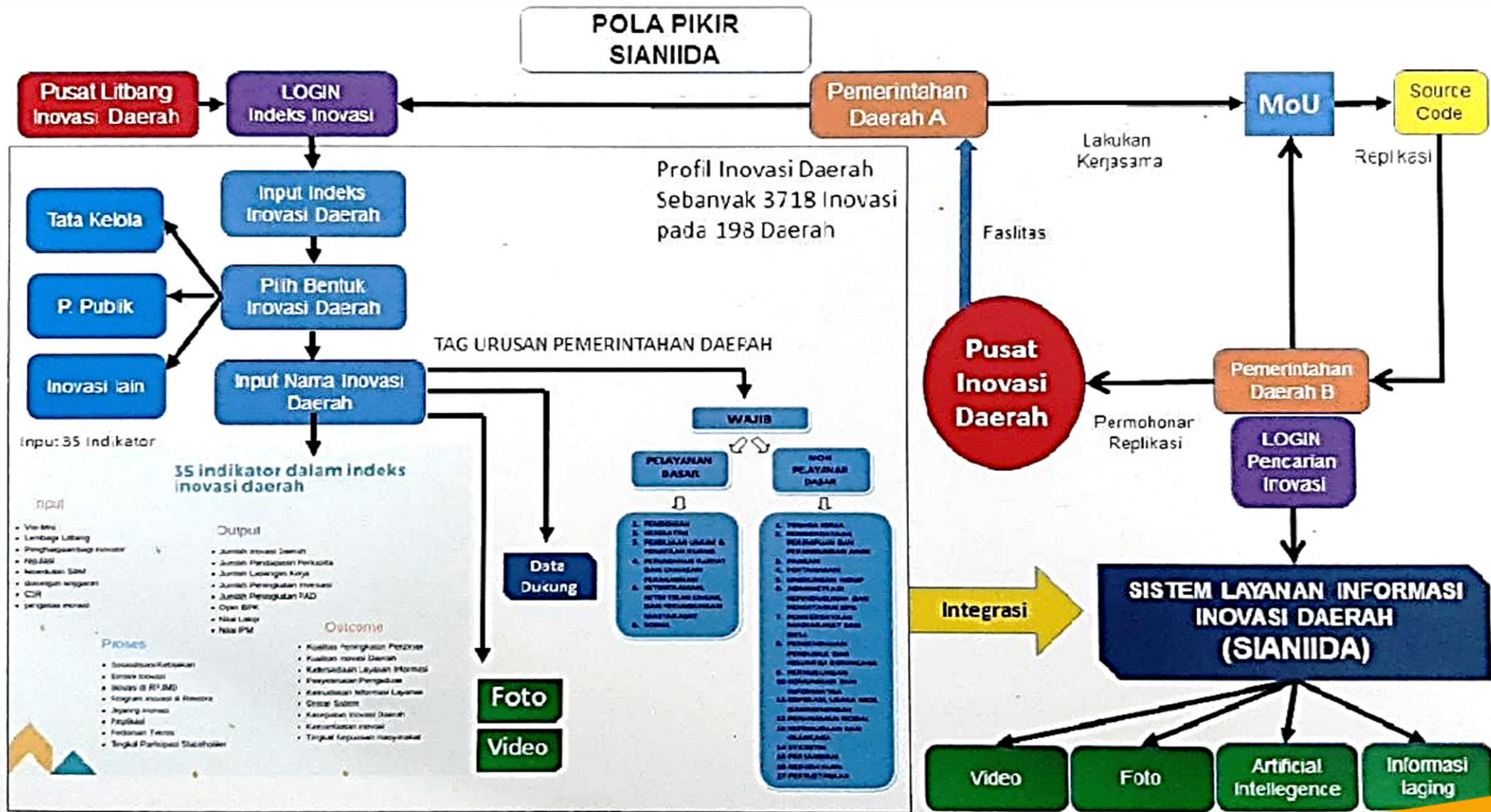


PERLU DIPERHATIKAN ANGGARAN PEMBINAAN INOVASI DAERAH, SEPERTI PELAKSANAAN SEMINAR INOVASI, DISEMINASI, REPLIKASI DAN PELAKSANAAN PERLOMBAAN INOVASI DAERAH



COPY SIANIDA

#6





PUJA INDAH

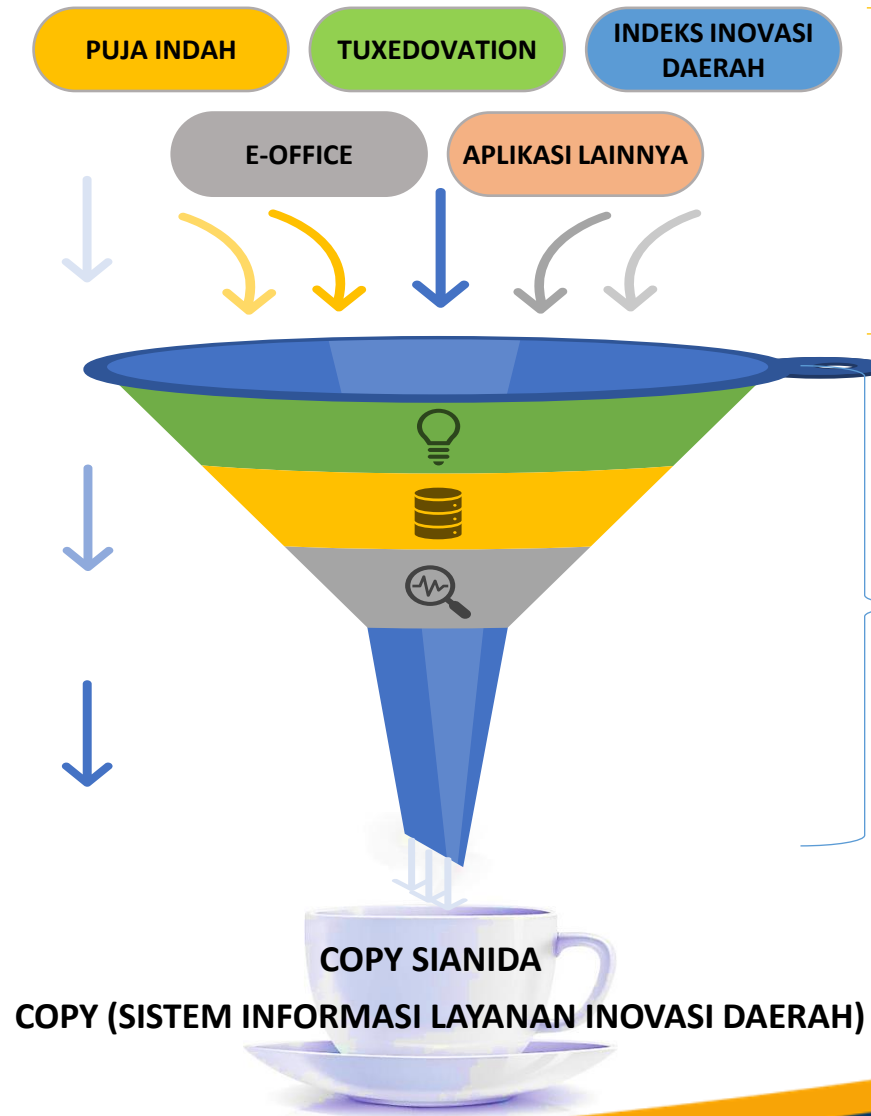
(PUSAT JEJARING INOVASI DAERAH) ADALAH KUMPULAN BERBAGAI APLIKASI LAYANAN PEMERINTAHAN. SAAT INI TELAH ADA 7 APLIKASI LAYANAN YANG DIMUAT DI DALAM PUJA INDAH, YAITU: **PERIZINAN, KESEHATAN, PENDIDIKAN, KOMODITAS, KETENAGAKERJAAN, UPDATE KEPENDUDUKAN DAN ASPIRASI DPRD/EKSEKUTIF**

TUXEDOVATION

(TUTORIAL EXHIBITION DISPLAY OF INNOVATION) MERUPAKAN SITUS BERBAGI VIDEO INOVASI DAERAH YANG BERASAL DARI INPUTAN DAERAH KE DALAM APLIKASI INDEKS INOVASI DAERAH

INDEKS INOVASI DAERAH

INDEKS INOVASI DAERAH MERUPAKAN HIMPUNAN INOVASI DAERAH YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI SEBUAH BENTUK PEMBAHARUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.





TARGET KINERJA TAHUN 2020

TARGET CONCEPT
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

#7



TARGET KINERJA TAHUN 2020

75 DAERAH YANG MENERAPKAN INOVASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DENGAN PLATFORM SISTEM INFORMASI LAYANAN INOVASI DAERAH

300 DAERAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN INOVASI DAERAH SECARA LINTAS K/L (KEMENDAGRI, KEMENPAN RB, KEMENRISTEK-DIKTI/BRIN, LAN, BAPPENAS DAN KEMENKEU

KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PELAKSANAAN INOVASI DAERAH (BERUPA PERATURAN/REGULASI)

5 (LIMA) DAERAH PILOT PROJECT YANG MENERAPKAN INOVASI DAERAH YANG BERSIFAT TEMATIK GUNA MENDUKUNG IKLIM INVESTASI (BERBASIS URUSAN PEMERINTAHAN/POTENSI DAERAH DAN FOKUS PADA DAERAH 3T)

548 DAERAH YANG DILAKUKAN PENILAIAN INOVASI DAERAH SECARA TERPADU BERBASIS INDEKS INOVASI DAERAH

75% REKOMENDASI HASIL KELITBANGAN BIDANG INOVASI DAERAH YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEBIJAKAN





Melakukan percepatan inovasi daerah dengan membuat Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah

Membuat SK TIM Koordinasi Percepatan inovasi di Pemerintahan Daerah

Melakukan Kajian Terapan dalam Penerapan inovasi antara lain: Inisiatif inovasi daerah, Pelaksanaan inovasi daerah dan evaluasi hasil penerapan inovasi daerah



Membuat Ajang Kompetitif Penciptaan dan Lomba inovasi daerah. Pada Tingkat provinsi ajang dapat dilakukan pada lomba inovasi daerah tingkat OPD dan Kab/Kota dibawahnya. Sedangkan di Kab/Kota menyelenggarakan Inovasi Daerah tingkat daerah Kab/Kota

Membuat Rumusan Peta Jalan Capaian inovasi Daerah Kedepan

Melakukan Branding dan Replikasi hasil inovasi daerah yang telah diterapkan









“Kita harus berubah, kita tidak boleh hanya mendorong pemerintah daerah yang inovatif, tapi kita juga harus dapat lebih berinovasi demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan”

“Semangat Berinovasi”

-Matheos Tan-

SEBELUM MEMULAI ACARA, SILAHKAN UNTUK BAHAN PAPARAN, BISA DIDAPAT DENGAN SCAN QR CODE ATAU DI DOWNLOAD MELALUI LINK DIBAWAH INI:



-  puslitnovkemendagri
-  puslitnovkemendagri
-  puslitnov
-  puslitnovkemendagri
-  puslitnovkemendagri
-  puslitbangnovda@gmail.com





***SEKIAN DAN
TERIMA KASIH***

